



RANCANGAN RENCANA KERJA KECAMATAN TARUB TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN TARUB**

Jl. Raya Tangkil - Mindaka, Tarub Tegal, Jawa Tengah 52184
<http://tarub.tegalkab.go.id> email: kec-tarub@tegalkab.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Renja) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja (Renja) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi Rancangan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan. Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tarub Tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2023, rancangan prioritas dan sasaran serta program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harapkan dari pihak semua guna mewujudkan cita – cita serta visi dan misi Kabupaten Tegal.

Tarub, 2022
CAMAT TARUB

Drs. AGUNG BUDI WALUYO, MM
Pembina TK I
NIP. 19710205 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Tarub Tahun 2021	7
2.1. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tarub	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
Bab III Tujuan dan Sasaran	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	28
3.3. Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan	29
3.4. Program dan Kegiatan	29
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan	32
Bab V Penutup	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2021 Kecamatan Tarub.....	8
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	16
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.....	20
Tabel 2.4	: Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	27
Tabel 3.1	: Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	30
Tabel 4.1	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2023.....	34
Tabel 4.2	: Rencana Kerja/ Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tarub Tahun 2023.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sejalan dengan penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD yang disusun berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran akan lebih realistis tepat anggaran, tepat sasaran karena dalam dokumen Renja terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan kegiatan. Lebih-lebih dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan kata lain dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (*framework*) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tarub Tahun 2023 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran, indikator kinerja, hasil dan keluaran yang terukur, kelompok sasaran dan rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan guna mendukung kebijakan Bupati terpilih tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tarub dan diimplementasikan ke dalam Renja.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Camat Tarub Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tegal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2019 2024 dan pedoman kerja Kecamatan Tarub Tahun 2023.
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.
3. Untuk memberikan gambaran tentang target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting tentang tugas dan fungsi OPD, serta review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan tahun 2023.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Terdiri dari telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TARUB

Terdiri dari rencana kegiatan dan Program serta target untuk Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN TARUB TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Capaian Renja Tahun 2021.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tarub, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2021 Kecamatan Tarub melaksanakan lima (5) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tarub Tahun 2021.

Dari lima (5) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar 80,49%. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021
dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Tarub

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (sesuai Permendagri 90)	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian dan Pagu Penetapan			Realisasi Renja 2021	
		Target Capaian	Pagu Penetapan 2021	Pagu Perubahan Anggaran 2021	Realisasi Renja 2021	Realisasi Keuangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.456.524.000	1.723.846.500		84,38
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.638.000	14.348.000		15,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja SKPD	5 buku	4.187.000	2.563.000	5 Buku	7,32
	Penyusunan dokumen Perubahan Renstra OPD	1 dokumen			1 dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profile Kec.	1 dokumen	24.451.000	11.785.000	-	16,74
	Pameran investasi/Percn. Pembangunan	1 kegiatan			-	
	Penyusunan LKjIP	5 buku			5 Buku	
	Penyusunan Dokumen SPIP	5 buku			-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.269.411.000	1.356.007.000		96,73

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.249.711.000	1.336.307.000	14 Bulan	96,69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan SKPD	12 bulan	19.700.000	19.700.000	12 Bulan	99,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah			44.740.000	69.740.000		51,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2.635.000	2.635.000	2 jenis	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	15 jenis	9.900.000	9.900.000	15 jenis	89,5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan kantor	15 jenis	2.790.000	2.790.000	15 jenis	99,8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	6.685.000	6.685.000	11 bulan	90,39
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	16000 lbr	3.605.000	3.605.000	16000 lbr	90,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan/koran	12 bulan	2.640.000	2.640.000	12 bulan	79,55
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah	210 kali	16.485.000	41.485.000	51	24,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63.245.000	77.800.000		69,35
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	350 lembar	1.495.000	500.000	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik	12 bulan	30.000.000	33.000.000	12 bulan	42,75
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium petugas kebersihan dan Petugas Jaga malam	12 bulan	31.750.000	44.300.000	12 bulan	89,94
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	150.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Video Conference	I Set		150.000.000	-	-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.490.000	55.951.500		91,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 unit mobil dan 10 unit motor	40.100.000	40.100.000	1 unit mobil dan 10 unit motor	92,85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Gedung	10.390.000	10.390.000	1 Gedung	75,07
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laptop; 1 Komputer; 2 Printer	-	5.461.500	2 Laptop; 1 Komputer; 2 Printer	92,80
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		41.185.000	41.185.000		52,16
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.031.000	20.031.000		40,84
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rakor Bidang Pemerintahan (Rakor Penderasan PBB dan Rakor Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, rakor LKPJDes)	3 rakor	20.031.000	20.031.000	Rakor PBB Penderasan PBB	40,84
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			15.897.000	15.897.000		62,04
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rakor bidang Yanum (Pendataan sarana prasarana infrastruktur, Sanitasi dan Persampahan	3 rakor	15.897.000	15.897.000	Rakor Pendataan sarana prasarana infrastruktur, Sanitasi dan Persampahan	62,04
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5.257.000	5.257.000		65,46
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan (Penertiban Perijinan)	1 kegiatan	5.257.000	5.257.000	Pelayanan dan Monitoring Perizinan	65,46

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			166.227.000	87.079.500		34,79
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			166.227.000	87.079.500		34,79
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	17.985.000	17.985.000	Terlaksananya Musrenbang Kec	87,89
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tilik Desa	1 kegiatan	148.242.000	69.094.500	-	20,97
	Hari Jadi Kabupaten Tegal	1 Kegiatan			-	
	Pelatihan/Lomba Gamelan	1 Kegiatan			-	
	Penyelenggaraan MTQ	1 kegiatan			-	
	Penyelenggaraan FASI	1 kegiatan			-	
	Pembinaan PKK	20 Desa			12 Kegiatan PKK	
	Pembinaan Kepemudaan	1 kegiatan			1 Kegiatan	
	Rakor Bidang Kesra	6 Rakor			-	
	Rakor Bidang Pemberdayaan Desa	3 Rakor			Rakor Mitigasi Bencana	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			53.265.000	53.265.000		64,19
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			53.265.000	53.265.000		64,19
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan HUT RI	1 kegiatan	31.833.000	31.833.000	Pelaksanaan HUT RI	41,45
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Forkopimcam	12 bulan	21.432.000	21.432.000	Pelaksanaan Forkopimcam	97,98

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.193.000	30.193.000		57,61
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30.193.000	30.193.000		57,61
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Lomba Desa (Monev Adm Desa)	20 desa	5.883.000	5.883.000	Monev Adm Desa	53,54
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan Lembaga Desa BPD	20 Desa	7.751.000	7.751.000	Pembinaan Lembaga Desa BPD	84,91
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Linmas	1 kegiatan	16.559.000	16.559.000	Pembinaan Linmas	46,27
	Rakor Keamanan Lingkungan	kegiatan			Rakor Keamanan Lingkungan	
			1.747.394.000	1.935.569.000		80,49

Sumber : Kecamatan Tarub 2021

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Tarub Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan, karena faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Refocussing anggaran untuk mempercepat penanganan Covid 19;
 - b. Efisiensi anggaran berupa sisa dari beberapa rekening belanja.
 - c. Penerapan kebijakan PPKM di Kabupaten Tegal.
2. Faktor-faktor pendukung keberhasilan kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
 - b. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
 - c. Intensifikasi
 - d. Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
 - e. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
 - f. Modifikasi bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Tarub

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat Tarub Nomor 01.001/130/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Perizinan.

Beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan yaitu meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan luas dibawah 100 M2
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
3. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Umum tingkat Kecamatan

Selain pelayanan perizinan yang dikelola oleh Kecamatan Tarub, ada beberapa pelayanan dimana fungsi Kecamatan hanyalah memberikan rekomendasi atau surat pengantar ke Dinas/Instansi yang mengelola langsung pelayanan dimaksud.

Beberapa pelayanan tersebut antara lain :

1. Pelayanan KTP/KK
Proses pelayanan KTP/KK dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal melalui petugas PATEN yang ditempatkan di Kecamatan Tarub. Oleh karena itu baik standar operasional prosedur dan kelancaran proses pelayanan KTP/KK di Kecamatan Tarub tergantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
2. Surat Pengantar SKCK
Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Tarub hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Tarub.
3. Surat Pengantar Ijin Keramaian
Penerbitan Surat Ijin Keramaian merupakan wewenang Polres Tegal dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek Tarub dan diketahui oleh pihak Kecamatan.
4. Surat Keterangan Pindah
Pengurusan surat keterangan pindah yang menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal,

namun dalam proses pembuatannya memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

5. Pelayanan Surat-surat Lainnya

Dalam hal pengurusan surat – surat lainnya yang meliputi diantara lain surat keterangan beasiswa, surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan/pengantar lainnya.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Tarub disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (Tabel C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Renja		Catatan Analisa
			Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (Tahun n)	Tahun 2023 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (thn n+1 Disamakan Target Renstra)	
Indikator dan Target Renstra 2019-2024											
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik		80,55	81,8	83,05	84,05	80,55	79,08	83,05	84,05	
2	Desa Berkembang		16	16	15	15	16	16	15	15	
	Desa Maju		4	4	4	4	4	4	4	4	
	Desa Mandiri		0	0	1	1	0	0	1	1	
Indikator dan Target Perubahan Renstra 2022-2024											
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik		80,55	81,8	83,05	84,05	80,55	79,08	83,05	84,05	
2	Prosentase Desa yang Tertib Administrasi		50	50	68	89	50	50	68	89	
3	Desa Berkembang		16	16	16	15	16	16	16	15	
	Desa Maju		4	4	4	4	4	4	4	4	
	Desa Mandiri		0	0	0	1	0	0	0	1	
4	Prosentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan		100	100	100	100	100	100	100	100	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Tarub Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Tarub yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut
 - Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan reealisasi kegiatan
 - Belum tersedianya ruang pelayanan yang representative di Kantor Kecamatan Tarub, karena Gedung Kantor Kecamatan Tarub terbakar pada tahun 2019.
 - Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait
 - Merupakan IKU baru hasil Perubahan Renstra 2019-2024.
2. IKU Kecamatan Tarub yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IDM (Indeks Desa Membangun)
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
 - Ada review RPJM sesuai dengan RKP

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan Tarub Tahun 2021 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2023 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan;

- Perlu peningkatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan APBDes yang lebih intensif.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes secara rutin

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu penting merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Isu-isu penting pada Kantor Camat Tarub antara lain adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kecamatan Tarub, karena pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

2. Masih rendahnya prosentase desa mandiri

Belum Terwujudnya Desa Mandiri, karena desa mandiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adanya kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya

Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut, harus ada tindakan konkrit sebagai berikut :

1. Perlu penambahan personil yang capable di bidang komputerisasi sehingga program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar.
2. Perlu segera dibangun gedung baru kecamatan Tarub pasca terjadinya kebakaran dan penambahan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan sehingga seluruh program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
3. Dengan adanya anggaran kegiatan yang cukup akan dapat mendukung program dan kegiatan Bupati terpilih tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat lihat pada Tabel T-C.31

Tabel 2.3. (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kecamatan Tarub
Kabupaten Tegal Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal Renja Tahun 2023		Rancangan Renja Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01				KECAMATAN						
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub		2.157.891.100			
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu		35.000.000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dok RTP, SPIP, Jumlah Dok renja/renja perubahan, jumlah dok renja RB, Jumlah Dok Renstra/Perub renstra	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	5.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok Laporan kinerja LKJIP, Lap Keu, LAKIP	1 Tahun	29.000.000	1 Tahun	17.500.000	Kecamatan Tarub

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.367.671.000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.342.671.000	1 Tahun		Kecamatan Tarub
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan, jumlah pelaporan	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	39.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan		15.000.000			
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	1 ASN	15.000.000			Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.000.000		110.000.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kebutuhan alat listrik dan elektronik	6 Jenis	5.000.000	6 Jenis	4.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpebuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	15.000.000	20 Jenis	28.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpebuhnya kebutuhan peralatan rumah tangga	16 Jenis	5.000.000	16 Jenis	6.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	15.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah amplop dinas, stopmap dinas banner tercetak dan dokumen yang terdandakan	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	16.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.000.000	Kecamatan Tarub

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tercapainya perjalanan dalam rangka kedinasan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	37.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan		371.430.100		76.500.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Meja/Kursi Pegawai dan Mebeulair Ruang Pelayanan Kecamatan Tarub		169.059.000			Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas tersedia					Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor		152.371.100		76.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya tercukupi		50.000.000			Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan		118.790.000		55.000.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya materi	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	1.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya layanan listrik, telepon dan Internet	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	42.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	51.290.000	12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD		181.000.000		55.000.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan aktif surat pajak kendaraan; jumlah liter BBM	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	47.500.000	Kecamatan Tarub

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan memsin yang terpelihara	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya bangunan kerja gedung kantor	1 Gedung		1 Gedung		Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya terpelihara	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung		Kecamatan Tarub
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	83,05%	52.600.000	83,05%	30.000.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan		33.100.000		21.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa (Tilik Desa)	12 Bulan	33.100.000	12 Bulan	21.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan		19.500.000		9.000.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rakor PBB (penderasan) paten, IMB	12 Bulan	19.500.000	12 Bulan	9.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	20% 0%	135.000.000	20% 0%	80.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa		135.000.000		80.000.000	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah Partisipasi Masyarakat Kec dan Musrenbang Desa dan jumlah kegiatan pameran musrenbang	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	10.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah rakor, jumlah pelatihan (rakor pasar, pelatihan manajemen BUMDes)		10.000.000			Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasi, Festival Budaya, Karang Taruna, MTQ, Rakor Kemiskinan	4 Kegiatan	100.000.000	4 Kegiatan	70.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		21.236.500		11.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum		11.236.500		11.000.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor mitigasi bencana, jumlah kegiatan siskamling, jumlah kegiatan satgas covid 19	3 Kegiatan	11.236.500	3 Kegiatan	11.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan		10.000.000		-	
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi Pengakan Perda dan Jumlah sosialisasi perda	3 Kegiatan	10.000.000	3 Kegiatan	-	Kecamatan Tarub

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan			115.000.000		70.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				115.000.000		70.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	hari jadi Kab tegal dan HUT RI	2 Kegiatan	65.000.000	2 Kegiatan	39.000.000		Kecamatan Tarub
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	FKDM	1 Forum	25.000.000	1 Forum			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Kominikasi Pimpinan Kecamatan	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	31.000.000		Kecamatan Tarub
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi			59.050.000		17.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan			59.050.000		17.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Desa	16.200.000	20 Desa	3.000.000		Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	20 Desa	12.500.000	20 Desa	2.500.000		Kecamatan Tarub

7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	20 Desa	21.350.000	20 Desa	9.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	20 Desa		20 Desa		Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	20 Desa		20 Desa		Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa	9.000.000	20 Desa	2.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Desa		20 Desa		Kecamatan Tarub
								2.540.777.600		600.000.000	

Mencermati materi rancangan awal RKPD maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 mendasari pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang telah dilakukan penyelarasan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024.
- b. Penyusunan usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dibatasi melalui Pagu Indikatif OPD;
- c. OPD menyusun program kegiatannya berdasarkan prioritas dan sangat memungkinkan terjadi pengurangan anggaran pada prioritas anggaran yang lain.
- d. Diperlukan tambahan anggaran di luar pagu indikatif OPD guna memenuhi kebutuhan OPD agar kinerja pelayanan OPD dapat berjalan lebih optimal.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 dan Form I.A

**Tabel 2.4. (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN,

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan perencanaan program dan kegiatan pada kantor Camat Tarub diselaraskan dengan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub Tahun 2019 – 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja Kecamatan Tarub Tahun 2023 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tarub 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023.
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Kecamatan Tarub.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun

berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

3.3. Strategi Pengarusutamaan Dalam Pembangunan

- a. Pengarusutamaan Gender ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathaway, gender budget statemen sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

3.4. Program dan Kegiatan

Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 berpedoman pada RKPD dan Renstra Kecamatan Tarub Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tegal;

Program kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan tahun 2022 adalah:

Tabel 3.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN
7	01				KECAMATAN
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarub Tahun 2023, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tarun Kabupaten Tegal pada dasarnya merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan rencana strategis Kecamatan Tarub tahun 2019-2024 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Rencana kerja juga merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”***. Selain itu sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, pertama, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Kedua, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Ketiga, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur output dan outcome-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. Keempat, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Rancangan Rencana kerja Kecamatan Tarub tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang akan dituju dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2023		Kelompok Saaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif		Target 2024	Pagu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN							
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub		392.000.000			64.350.000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu		22.500.000	Kecamatan Tarub		4.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000		8 Dokumen	5.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.500.000		3 Laporan	9.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		39.000.000	Kecamatan Tarub		40.000.000	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	-		21 ASN	-	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.000.000		12 Dokumen	40.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan		-	Kecamatan Tarub		-	
7	01	01	2.05	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	1 ASN	-			-	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		110.000.000	Kecamatan Tarub		126.100.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.500.000		1 Paket	5.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.000.000		1 Paket	35.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000		1 Paket	6.600.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000		1 Paket	16.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.000.000		1 Paket	20.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000		24 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Tarub

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	37.500.000		60 Laporan	40.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan		76.500.000	Kecamatan Tarub		225.000.000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-		0	150.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-			-	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	76.500.000		9 Unit	75.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-		0	-	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan		89.000.000	Kecamatan Tarub		89.250.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	1.500.000		250 Laporan	1.750.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	42.500.000		36 Laporan	42.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	45.000.000		24 Laporan	45.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD		55.000.000	Kecamatan Tarub		260.000.000	

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	47.500.000		8 Unit	50.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.500.000		12 Unit	10.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-		0	-	Kecamatan Tarub
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-		0	200.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	83,05%	30.000.000			33.100.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan		21.000.000	Masyarakat Kecamatan Tarub		23.100.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	21.000.000		12 Dokumen	23.100.000	Kecamatan Tarub
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan		9.000.000	Masyarakat Kecamatan Tarub		10.000.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9.000.000		12 Laporan	10.000.000	Kecamatan Tarub

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	20% 0%	80.000.000			88.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa		80.000.000	Masyarakat Kecamatan Tarub		88.000.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000		20 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	-			-	Kecamatan Tarub
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	70.000.000		5 Laporan	77.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		11.000.000			11.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum		11.000.000	Masyarakat Kecamatan Tarub		11.000.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	11.000.000		3 Laporan	11.000.000	Kecamatan Tarub

7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	-	Masyarakat Kecamatan Tarub	-			
7	01	04	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	-	0	10.000.000	Kecamatan Tarub	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan				70.000.000	81.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					70.000.000	Masyarakat Kecamatan Tarub 81.000.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	39.000.000	50.000.000	Kecamatan Tarub
					Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	-			-	

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	31.000.000		12 Dokumen	31.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi		17.000.000			51.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan		17.000.000	Pemerintahan Desa Kecamatan Tarub		51.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		20 Dokumen	3.000.000		20 Dokumen	4.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	20 Dokumen	2.500.000		20 Dokumen	3.500.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	20 Dokumen	9.000.000		20 Dokumen	10.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi				20 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi				20 Dokumen	15.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20 Dokumen	2.500.000		20 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Tarub
7	01	06	2.01		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun					-	Kecamatan Tarub
								600.000.000			1.028.450.000	

Tabel 4.2
Rencana Kerja/Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Tarub Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2023		Penanggung Jawab
			Target	Satuan	
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Laju Peningkatan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tarub		1	Prosen	Camat Tarub
Meningkatnya kualitas pemberdayaan desa	Laju Peningkatan Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub		5	Prosen	Camat Tarub
	Laju Peningkatan Persentase desa maju		5	Prosen	Camat Tarub
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Laju Peningkatan Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub		21	Prosen	Camat Tarub
Meningkatnya manajemen administrasi pelayanan umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan	Presentase Pemenuhan Layanan kesekretariatan		100	Prosen	Camat Tarub
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Tarub			
	Perencanaan, penganggaran dan penyusunan dokumen evaluasi Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	Sekcam Kasubag PRK
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	Sekcam Kasubag PRK

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	ASN	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Sekcam Kasubag PRK
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan			
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	0	ASN	Sekcam Kasubag Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	Dokumen	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	Sekcam Kasubag Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan BMD yang dibutuhkan			
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	Sekcam Kasubag Umpeg

	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Gedung	Sekcam Kasubag Umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	Laporan	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	Sekcam Kasubag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan BMD			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Gedung	Sekcam Kasubag Umpeg
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	0	Gedung	Sekcam Kasubag Umpeg

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	83,05%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan			
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	Dokumen	Seksi Pelayanan Publik
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	Seksi Pelayanan Publik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Maju Prosentase Desa Mandiri	20% 0%		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi, data perkembangan Desa			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20	Lembaga Kemasyarakan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	Lembaga Kemasyarakan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya koordinasi yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban umum			
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	Laporan	Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan			
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	Laporan	Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	Orang	Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	Orang	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	20	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa dan BPD yang terbina	20	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	0	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa terisi	0	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	20	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	0	Dokumen	Seksi Pemerintahan Desa

